

# PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Wawan Risnawan

## Abstrak

*Sebuah kebijakan publik terbentuk merupakan hasil dari proses politik yang tertuang dalam siklus sistem politik. Komponen-komponen dalam sistem politik itu sangat menentukan terbentuknya kebijakan publik yang baik dan berorientasi publik namun sebaliknya apabila komponen-komponen dalam sistem politik tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya maka akan tercipta kebijakan publik yang menimbulkan reaksi di masyarakat, dimana mereka menolak kebijakan tersebut karena mereka memandang kebijakan tersebut tidak memiliki nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Supra struktur politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat sangat memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan publik di masyarakat melalui sistem politik. Dengan demikian sangatlah penting setiap elemen yang berada dalam lingkup infrastruktur politik memahami dan mengetahui peran fungsinya dalam sebuah sistem politik untuk menciptakan suatu kebijakan yang berorientasi publik dengan memiliki nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Sistem Politik, Infrastruktur Politik, Kebijakan Publik*

### A. Latar belakang

Dalam sebuah pemerintahan yang menjadi leading sektor program pembangunan nasional, maka setiap output dari proses politik adalah sebuah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Sistem politik merupakan suatu siklus yang mengintegrasikan para pelaku politik dalam menyerap aspirasi politik di masyarakat menjadi sebuah regulasi melalui proses politik yang dilaksanakan oleh para elit politik yang tergabung dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kebijakan atau regulasi yang dihasilkan belum berorientasi kepada publik, hal ini tertuang dalam regulasi yang kurang memiliki keadilan di mata masyarakat seperti halnya Paket kebijakan ekonomi XVI yang menuai banyak kritik. Khususnya soal relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dinilai mempersempit ruang gerak pengusaha lokal untuk bersaing, dimana dalam hal ini pemerintah membuka investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan prosentase penguasaan modal cukup tinggi sampai ke 100%. Kondisi ini dipandang merugikan dan tidak adil oleh pengusaha pribumi.

(<https://www.merdeka.com/politik/kubu-prabowo-tuding-pemerintah-jokowi-lebih-berpihak-pada-asing.html>)

Kondisi lain atas kebijakan yang dipandang tidak adil oleh publik adalah dengan adanya kebijakan pengangkatan CPNS, sebagaimana yang diberitakan dalam **JawaPos.com** bahwa dengan dikeluarkannya Kebijakan penerimaan CPNS dari umum maka hal ini menuai reaksi untuk para tenaga honorer Kategori 2 yang sejak awal telah mengantri untuk diangkat menjadi CPNS.

Kasus-kasus yang terjadi tersebut dapat dipahami bahwa, masih perlu adanya integrasi persepsi dalam membuat kebijakan antara para pelaku politik yang berada dalam unsur infrastruktur politik dengan suprastruktur politik. Timbulnya kebijakan yang dipandang tidak adil oleh beberapa masyarakat yang berkepentingan, hendaknya diketahui dan dijadikan aspirasi oleh para unsur infrastruktur politik sebagai upaya perbaikan kebijakan selanjutnya, namun demikian halnya seperti Partai politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Media Sosial dan Tokoh Masyarakat, saat ini seolah tidak berada dalam garis integritas pada sebuah sistem politik yang baik. Kondisi ini terlihat dari perilaku masing-masing unsur infrastruktur politik itu sendiri, dimana partai politik sibuk memperluas jaringan kekuasaan masing-masing partai sehingga terkadang

timbul konflik baik dalam internal partai itu sendiri maupun dengan partai yang lainnya.

Kelompok kepentingan terkadang dijadikan alat politik sehingga mereka tidak lagi memahami peran dan fungsinya dalam pembentukan sebuah kebijakan publik pada sistem politik yang di jalankan saat ini, kelompok penekan sibuk dengan membuka kelemahan-kelemahan pemerintahan yang sedang berdiri yang di afiliasikan melalui media masa. Tokoh politik yang seharusnya menjadi sentral stabilisator bangsa, terkadang terjebak dengan situasi politik kepentingan yang berdampak kepada timbulnya kelompok-kelompok masyarakat.

Kondisi ini cukup memprihatinkan apabila terus berjalan, di satu sisi para elit politik sibuk untuk mendapatkan kekuasaan, di sisi lain masyarakat menunggu keberpihakan pemerintah atas harapan-harapannya. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat kita analisis bahwa kondisi tersebut terlihat tidak berjalannya peran dan fungsi infrastruktur politik di Indonesia dalam menjalankan roda sistem politik untuk mewujudkan kebijakn publik yang adil dan berorientasi publik, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang direspon positif oleh masyarakat bahkan dapat menciptakan konflik kelompok atau golongan.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan dari latarbelakang tersebut, maka penulis mencoba menarik benang merah dan fokus kajian atas permasalahan tersebut yakni bagaimana peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan Kebijakan Publik.

#### **B. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh tentang peran dan fungsi Infrastruktur politik dalam pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia berdasarkan pemahaman dan analisa konsepi tentang sistem politik di Indonesia.

#### **C. Metodologi Kajian**

Pada Kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur baik dari buku-

buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah yang selanjutnya di analisa melalui proses tahapan reduksi data untuk kemudian data disajikan sebagai bahan analisa yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

#### **D. Pembahasan**

Untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam siklus sistem politik di Indonesia yang outputnya menciptakan kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan publik yang adil maka sebagai tahapan awal kita harus memahami terlebih dahulu kedudukan kebijakan publik dalam sistem politik itu sendiri.

##### **1. Kebijakan Publik dalam Sistem Solitik**

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan Secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Berikut pendapat para ahli mengenai definisi kebijakan publik.

- **Thomas R. Dye** : Menurut Thomas R. Dye, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda
- **Carl Frederich** : Menurut Carl Frederich, pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada
- **David Easton** : Menurut David Easton, pengertian kebijakan publik adalah pengaruh dan aktivitas pemerintah. (Bambang. S, 2006:76)

Dari beberapa definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat memaksa dimana harapan adanya kebijakan publik tersebut adalah untuk

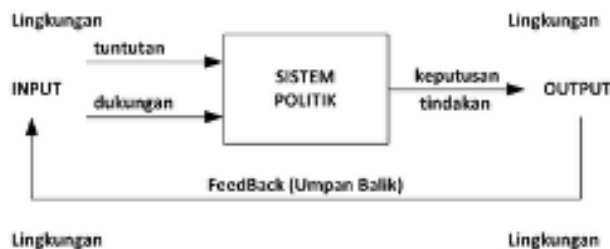
menciptakan stabilitas publik atau masyarakat. Terbentuknya kebijakan publik merupakan hasil dari proses kerja sistem politik dimana output dari sistem politik tersebut adalah berupa kebijakan publik.

## 2. Sistem Politik

Sistem politik menurut David Easton dalam Ramlan. S (1992:18) adalah terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (*polity*) untuk membuat suatu keputusan politik.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan. Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari. (Sukarna. 1981:16)

Berikut *Skema Kerja Sistem Politik Easton*



Dalam gambar tersebut, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah

masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Input adalah *pemberi makan* sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi *garapan* aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu *positif* (*forwarding*) dan *negatif* (*rejecting*) kinerja sebuah sistem politik.

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan.

Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklus.

### 3. **Infra Struktur Politik**

Dalam siklus sistem politik dikenal sebagai suatu rangkaian tindakan para pelaku politik untuk merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah output dari proses politik setelah menerima dan mengkaji beberapa masukan (input) dari penerima aspirator dalam hal ini suprastruktur politik.

#### a. **Pengertian Infra Struktur Politik**

Pengertian Infrastruktur Politik secara singkat adalah, infrastruktur memang diartikan sebagai pembangunan, namun dalam dunia politik makna ini diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), partai politik, media massa, interest group, tokoh politik dan lain-lain yang bergerak secara independen.

Adapun pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

#### b. **Komponen-komponen dari infrastruktur politik dan Peran serta Fungsinya dalam sistem politik**

Dalam Infrastruktur politik terdapat komponen-komponen didalamnya antara lain :

1. Partai politik : Yaitu organisasi manusia di dalamnya terdapat pembagian tugas, mempunyai tujuan, ideologi, program dan rencana kedepan.

Adapun fungsi partai politik. *Pertama*, partai sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam

pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*). Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai. *Kedua*, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Ketiga*, partai politik sebagai sarana rekrutmen. Partai politik melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. *Keempat*, partisipasi politik. Partai politik sebagai wadah bagi warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. *Kelima*, partai politik sebagai pemandu

kepentingan. Partai politik melakukan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. *Keenam*, komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya. *Ketujuh*, pengendalian konflik. Partai politik berfungsi mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi (cita-cita) dan kepentingan dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah dalam badan perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.

## 2. Golongan kepentingan

Karena keberagamannya kelompok-kelompok kepentingan ini Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today : A World View* (1992) dalam Rahman. A (2007:88) yang diedit bersama, membagi kelompok kepentingan dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Kelompok kepentingan Anomik  
Kelompok anomik muncul secara kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur. Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.
- b. Kelompok kepentingan Non-Asosiasional Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu

lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota. Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.

- c. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan) Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.
- d. Kelompok Kepentingan Asosiasional Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus. Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

Adapun Peran dan Fungsi Kelompok Kepentingan adalah :

- (a) Media penampung kepentingan masyarakat Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pulaterabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlumemperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya.
- (b) Mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap

pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. (c) Sebagai salah satu saluran input bagi pemerintah Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang merekaberikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan (mungkin) tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.

3. Media komunikasi politik : Merupakan sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing golongan politik, alat komunikasi politik terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio dll. Adapun *Peran Media Komunikasi Politik* pada dasarnya memiliki enam peran dasar sebagai suatu sub sistem dari sebuah sistem politik, yaitu :

- **Penyampai Informasi**

Pada dasarnya media komunikasi politik merupakan sarana penyampaian arus informasi politik dari aktor politik maupun pemerintah kepada rakyat secara meluas.

- **Penyalur Aspirasi**

Media komunikasi politik kini juga berkembang

sebagai media penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah, yakni dari individu bagian dari rakyat kepada pemerintah yang juga dapat diketahui oleh rakyat secara luas.

- **Penghubung Pemerintah dan Rakyat**

Media komunikasi politik merupakan salah satu jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya serta sebaliknya antara rakyat dengan pemerintahnya.

- **Umpan Balik**

Media komunikasi politik juga dapat berperan menjadi sarana memberikan umpan balik kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dengan media komunikasi politik, rakyat dapat memberikan tanggapan atas kebijakan yang dikeluarkan apakah merugikan bagi rakyat ataukah menguntungkan rakyat.

- **Sosialisasi Politik**

Media komunikasi politik juga berperan menjadi agen sosialisasi politik bagi rakyat. Bahwa media sosialisasi politik dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada rakyat secara luas terkait dengan kebijakan ataupun problema dan isu politik tertentu. Seperti saat pesta demokrasi atau pemilu media memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi ke pada masyarakat secara luas.

- **Kontrol Sosial**

Media komunikasi politik dapat berperan sebagai pihak yang ikut mengawasi pemerintah bersama dengan rakyat. Dimana media komunikasi politik ini dapat dijadikan sebagai pengawas,

- pengkritik, pemberi masukan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Golongan penekan : Yaitu suatu golongan yang kegiatannya tampak dari luar mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi *pressure group*. (Bambang S dan Sugianto. 2007:177)
- Adapun Peranan dari kelompok penekan adalah Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju. Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
- c. Organisasi Kepemudaan,
- d. Organisasi Lingkungan Hidup,
- e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta

- f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.
5. Tokoh politik : Orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan dan keahlian dalam bidang politik. Contoh : Gus Dur, Amin Rais, Megawati, Yusuf Kalla, dll. Para tokoh politik ini memiliki peran sebagai penyalur aspirasi, sebagaimana tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranannya yaitu menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa secara menyeluruh peran dan fungsi dari infrastruktur politik yaitu : Sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan politik rakyat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan secara maksimal, menyatukan kepentingan yang beranekaragam dan nyata-nyata hidup di dalam masyarakat, menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat warga negara kepada pemegang kekuasaan, menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin serta sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat.

Apabila peran dan fungsi infrastruktur politik dalam tiap elemennya dijalankan dengan baik maka akan mewujudkan suatu kebijakan publik yang diharapkan masyarakat, lancarnya integrasi yang mendorong harapan masyarakat dalam bentuk kebijakan tergantung dari berjalan atau tidaknya peran fungsi komponen dalam sistem politik khususnya infra struktur politik. Baik dan produktifnya Infrastruktur politik maka merupakan sebuah kunci utama yang akan mendorong baiknya kinerja suprastruktur politik dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif, kemudian dengan produktifnya kinerja suprastruktur politik ini

maka akan menghasilkan kebijakan publik yang sesuai nilai dan harapan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Bambang S dan Sugianto. 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*..Penerbit Grahadi, Surakarta
- Rahman A. H.I. 2007 *Sistem Politik Indonesia*: Graha Ilmu, Yogyakarta
- Surbakti, Ramlan. 2010 “*Memahami Ilmu Politik*” Gramedia Widiasarana Indonesia, -----1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo, Jakarta
- Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Alumni, Bandung.
- Eman Hermawan, 2002, *Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar*, Klik R, Jogjakarta,).
- Soelistyati Ismail Gani, 1984, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### Artikel dalam WEBSITE

1. <https://media.neliti.com/media/publications/31309-ID-kelompok-kepentingan-dalam-proses-politik-pemerintahan-di-daerah-studi-kasus-per.pdf> (08:57 Tanggal 05 September 2017)
2. <https://www.merdeka.com/politik/kubu-prabowo-tuding-pemerintah-jokowi-lebih-berpihak-pada-asing.html> (11:41 Tanggal 05 September 2017)
3. [http://www.academia.edu/3769448/Makalah\\_SPI](http://www.academia.edu/3769448/Makalah_SPI) (09:00 Tanggal 05 September 2017)
4. <https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2018/tes-cpns-2018-kusut-honoror-k2-akhirnya-pemerintah-kualat> (09:15 Tanggal 05 September 2017)
5. <https://www.kitapunya.net/2015/06/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik.html> (14:25 Tanggal 07 September 2017)
6. <http://www.referensimakalah.com/2012/12/peran-dan-fungsi-partai-politik.html> (14:51 Tanggal 07 September 2017)
7. <https://pakarkomunikasi.com/peran-media-komunikasi-politik> (15:00 Tanggal 07 September 2017)